



**SENSUS
PENDUDUK
2010**

KATALOG BPS: 4102004.71

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI SULAWESI UTARA**

WELFARE INDICATORS OF SULAWESI-UTARA PROVINCE

2009

<http://sulut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
SULAWESI UTARA**
WELFARE INDICATORS OF SULAWESI UTARA
2009

ISBN	979 488 563 0
Nomor Publikasi	71522.1004
Katalog BPS	4102004.71
Ukuran Buku	21,59 X 29,7 cm
Jumlah Halaman	41 halaman

Naskah

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara

Gambar Kulit

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara

Diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Optimalisasi potensi daerah pada hakekatnya akan bermuara pada tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Karena masyarakat adalah subjek sekaligus menjadi objek pembangunan. Untuk melihat seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam wacana kesejahteraan rakyat, maka BPS Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyedia data, menerbitkan publikasi berjudul **Indikator Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara 2009**.

Publikasi ini merupakan publikasi tahunan BPS Provinsi Sulawesi Utara yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara antar waktu, dan melihat perbandingan antar kabupaten/kota. Data untuk analisis indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2009. Data ketenagakerjaan tidak ditampilkan dalam publikasi tahun ini karena sudah ditampilkan dalam publikasi khusus ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Manado, Oktober 2010
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Utara,



Drs. Jasa Bangun, MSi.
NIP. 19520520 197603 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. KEPENDUDUKAN	1
1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	1
1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	3
1.3 Struktur Umur dan Beban Ketergantungan	5
1.4 Fertilitas	8
II. KESEHATAN	9
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	9
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	10
III. PENDIDIKAN	16
3.1 Tingkat Pendidikan	16
3.2 Tingkat Partisipasi Sekolah	20
3.3 Fasilitas Pendidikan	21
IV. TARAF DAN POLA KONSUMSI	23
4.1 Perkembangan Kemiskinan	23
4.2 Taraf Konsumsi dan Protein	26
4.3 Perkembangan Tingkat Kesejahteraan	27
4.4 Pengeluaran Rumah Tangga	28
V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	31
5.1 Kualitas Rumah Tinggal	31

DAFTAR TABEL

Halaman

KEPENDUDUKAN

1.1	Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara	2
1.2	Persentase dan Kepadatan Penduduk Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2009	4
1.3	Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Sulawesi Utara, 2005 – 2009	5

KESEHATAN

2.1	Rata-rata Lama Sakit per Kabupaten/Kota, 2007 – 2009	10
2.2	Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi, 2007 - 2009	12
2.3	Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi di Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota, 2009	13
2.4	Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri menurut Jenis Pengobatan yang Digunakan menurut Kabupaten/Kota, 2008 – 2009	14
2.5	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat, 2007 – 2009	15

PENDIDIKAN

3.1	Angka Melek Huruf per Kabupaten/Kota, 2009	17
3.2	Persentase Penduduk 10 tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2009	19
3.3	Angka Partisipasi Sekolah menurut Usia Sekolah, 2009	20
3.4	Rasio Murid-Guru dan Guru-Sekolah tahun 2006/2007	22

TARAF DAN POLA KONSUMSI

4.1	Perkembangan Kemiskinan, 2007-2009	25
4.2	Konsumsi Energi dan Protein per kapita per hari 2007-2009	27
4.3	Pengeluaran per kapita per bulan, 2007-2009	27
4.4	Pengeluaran Rata-rata Nominal dan Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan selama sebulan 2008-2009	29

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

5.1	Persentase Rumahtangga menurut Indikator Kualitas dan Fasilitas Perumahan, 2007 – 2009	32
-----	--	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
1	Angka Beban Ketergantungan di Sulawesi Utara, 2005 – 2009	6
2	Periode Windows of Opportunity Nasional yang Terjadi pada Periode 2010-2045	7
3	Persentase Wanita Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Melakukan Perkawinan Pertama Menurut Usia Perkawinan Pertama di Sulawesi Utara, 2009	8
4	Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi di Sulawesi Utara, 2009	11
5	Angka Buta Huruf per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2009	18
6	Persentase Rumahtangga yang Menempati Rumah Sendiri di Provinsi Sulawesi Utara, 2009	30
7	Persentase Rumahtangga dengan Luas Lantai Rumah < 10 m ² per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2009	33
8	Persentase Rumahtangga yang Berlantai Tanah per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2009	34

I. KEPENDUDUKAN

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Jumlah penduduk yang tidak terkendali adalah sumber dari segala masalah sosial. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Masalah jumlah penduduk terkait erat dengan laju pertumbuhan penduduk. Semakin tingginya rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, otomatis akan meningkatkan jumlah penduduk secara pesat. Tingkat pertumbuhan yang tinggi pada tingkat ekonomi suatu daerah yang belum maju, dapat menimbulkan permasalahan baru. Pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbangkan oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban perekonomian secara makro dan menjadi beban rumahtangga secara mikro. Sedangkan pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbangkan oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang produktif biasanya karena faktor banyaknya migrasi pencari kerja yang masuk juga tentu akan menimbulkan masalah sosial baru di suatu daerah.

Pada tahun 2000 jumlah penduduk Sulawesi Utara mencapai 2,001 juta jiwa. Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah namun laju pertumbuhan relatif mengalami penurunan. Penurunan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana dimana program ini di

Indonesia ditujukan untuk menekan angka kelahiran, menciptakan norma keluarga kecil sehingga terbuka peluang bagi suatu keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarganya.

Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, permasalahan kependudukan di Sulawesi Utara perlu mendapat perhatian yang serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan adanya upaya peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan suatu upaya yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergis dengan program-program pembangunan lainnya yang sedang dan akan dilaksanakan.

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (juta)	Laju pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
1990	1,762	1,28 (1990-2000)
2000	2,001	1,25 (2000-2005)
2005	2,129	1,21 (2000-2009)
2009	2,229	

Sumber : Sensus Penduduk 1990&2000, Supas 2005 dan Proyeksi Penduduk 2009

Secara absolut jumlah penduduk Sulawesi Utara terus bertambah setiap tahunnya, namun secara relatif laju pertumbuhan penduduk terus menurun. Sejak periode 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara sudah dibawah 2 persen, tergolong cukup kecil dibandingkan daerah lain atau rata-rata nasional. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada periode 1990-2000 sebesar 1,45 persen per tahun, sedangkan laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara pada periode yang sama 1,28 persen. Pada periode 2000-2009 laju pertumbuhan penduduk semakin melambat yakni menjadi 1,21 persen per tahun.

Jumlah penduduk tercatat sebanyak 2,001 juta jiwa pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 2,129 juta jiwa pada tahun 2005. Empat tahun kemudian jumlah penduduk Sulawesi Utara sudah mencapai 2,229 juta jiwa. Banyak hal yang terkait

dengan penduduk ; fasilitas publik, perumahan, pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, sampai pada tata ruang wilayah. Masalah kependudukan bisa menjadi masalah yang serius bagi suatu daerah jika tidak ada sinkronisasi pembangunan dengan perkembangan kependudukan. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan.

1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk antara kabupaten dan kota tampak masih timpang, sehingga kepadatannya masih belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah kabupaten untuk bekerja di daerah kota. Hal ini juga terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, dimana persebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di perkotaan. Dengan luas hanya 6,81 persen dari seluruh luas wilayah daratan Sulawesi Utara, daerah kota dihuni oleh sekitar 36,71 persen penduduk Sulawesi Utara. Daerah yang terpadat penduduknya adalah Kota Manado, dimana setiap 1 Km² dihuni sekitar 2.754 jiwa. Sementara daerah yang jarang penduduknya adalah Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Kep. Talaud dan Kab. Bolaang Mongondow Utara, dimana di ketiga kabupaten tersebut setiap km² wilayahnya dihuni tidak sampai 60 orang.

**Tabel 1.2 Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota
Sulawesi Utara, 2009**

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Mongondow	6.230,95	307.786	49,4
Minahasa	1.025,85	300.226	292,7
Kep. Sangihe	625,96	130.449	208,4
Kep. Talaud	1.250,92	74.997	60,0
Minahasa Selatan	1.496,09	182.818	122,2
Minahasa Utara	937,65	176.480	188,2
Bolaang Mongondow Utara	1.696,09	80.508	47,5
Kep. Siau Tagulandang Biaro	387,07	61.781	159,6
Minahasa Tenggara	583,01	95.525	163,8
Manado	157,91	434.845	2.753,8
Bitung	304,00	180.618	594,1
Tomohon	146,60	83.718	571,1
Kotamobagu	431,50	119.105	276,0
Sulawesi Utara	15.273,60	2.228.856	145,9

Sumber: Sulawesi Utara dalam Angka 2009

Masalah yang sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk adalah masalah perumahan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, setidaknya pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah perkotaan harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat, sehingga tidak menimbulkan urbanisasi.

1.3. Struktur Umur dan Beban Ketergantungan

Tabel 1.3 menunjukkan komposisi penduduk Sulawesi Utara menurut tiga kelompok umur yakni kelompok umur produktif (15-64 tahun) dan kelompok umur tidak produktif muda (0-14 tahun) dan tidak produktif lanjut usia (65 tahun ke atas). Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2009, Sulawesi Utara memiliki penduduk usia muda sekitar 27,47 persen, penduduk usia produktif 66,28 persen, dan penduduk usia lanjut 6,25 persen. Angka ini sedikit berbeda dengan situasi pada tahun 2005 dimana penduduk usia muda masih 26,28 persen, sementara penduduk usia lanjut 5,45 persen, penduduk usia produktif 68,26 persen. Dengan kata lain, selama periode tahun 2005-2009 telah terjadi peningkatan komposisi penduduk usia lanjut, dan dikenal dengan istilah proses penuaan (*aging process*) atau proses transisi umur dari penduduk muda ke penduduk tua, walaupun di lain pihak juga terjadi penambahan proporsi penduduk usia muda dan pengurangan proporsi penduduk usia produktif.

**Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan
Di Sulawesi Utara, 2005-2009**

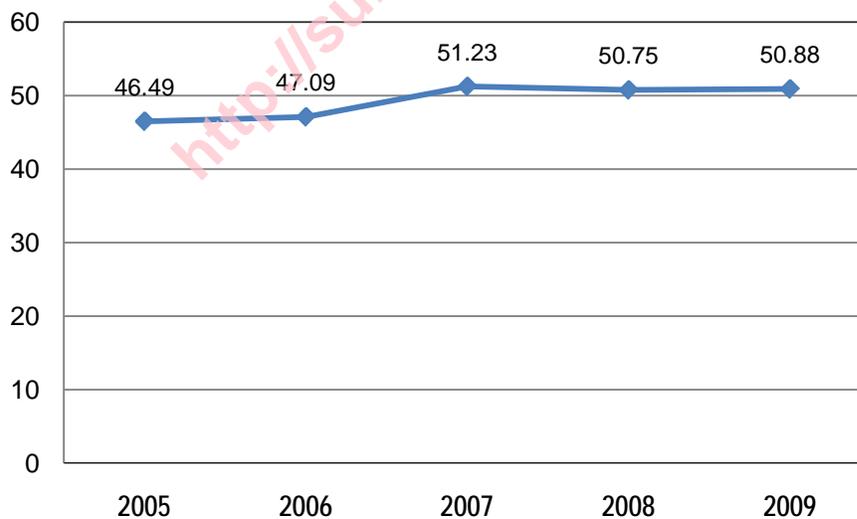
Tahun	0 – 14	15 – 64	65 +	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2005	26,28	68,26	5,45	46,49
2006	26,06	68,04	5,95	47,09
2007	27,82	66,12	6,05	51,23
2008	27,40	66,34	6,27	50,75
2009	27,47	66,28	6,25	50,88

Sumber : Susenas

Struktur umur penduduk Sulawesi Utara berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (dibawah 15 tahun) kurang dari 30 persen (memenuhi kategori penduduk tua seperti ditunjukkan pada Tabel 1.3 Di sisi lain proporsi penduduk tuanya (usia 65+) masih sekitar 6 persen (belum masuk kategori penduduk tua).

Bila proporsi penduduk usia tidak produktif semakin rendah (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) maka angka beban ketergantungan akan semakin rendah. Semakin rendah angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya dan keturunannya dengan adanya investasi *human capital* maupun *saving*. Pada tahun 2008, angka beban ketergantungan sebesar 50,75 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 51 penduduk usia tidak produktif.

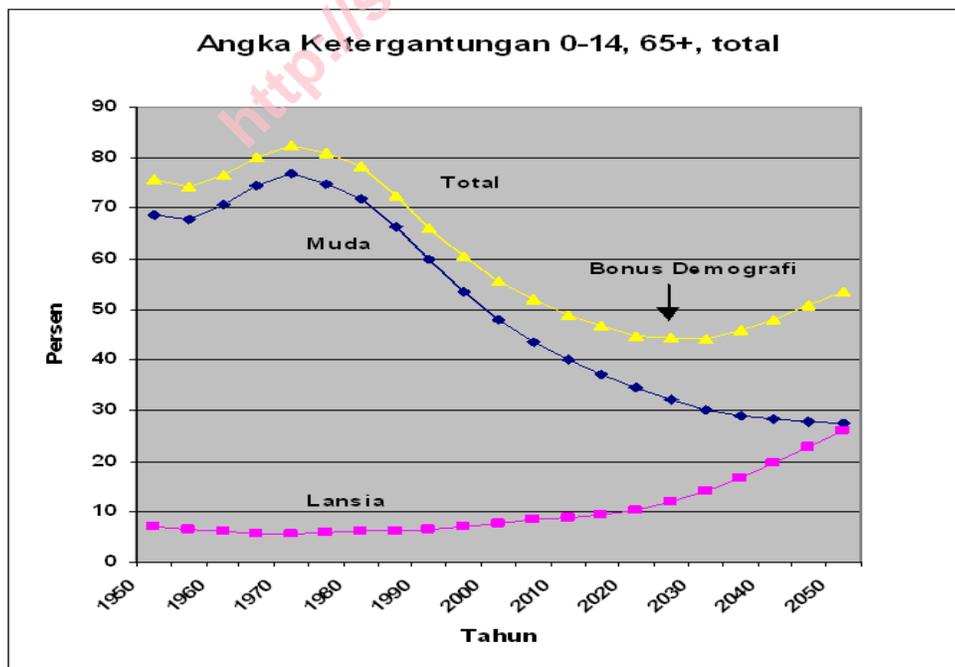
Gambar 1. Angka Beban Ketergantungan Tahun 2005-2009



Tren angka beban ketergantungan 2005-2009 terlihat ke arah peningkatan (dengan pengecualian di tahun 2007 yang sudah terlebih dahulu naik ekstrim). Angka beban ketergantungan di bawah 50 sebenarnya merupakan indikasi bahwa Sulawesi Utara masih berada pada periode jendela peluang (*windows of opportunity*). Pada

periode pendek tersebut diperoleh adanya bonus demografi yakni keuntungan ekonomis akibat adanya peningkatan proporsi penduduk usia produktif sehingga setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 50 penduduk usia tidak produktif atau perbandingannya hanya setengahnya. Ilustrasinya pada suatu rumahtangga setiap 2 anggota rumahtangga usia produktif (misalnya ayah dan ibu) terdapat satu anggota rumahtangga yang tidak produktif, anak dibawah 15 tahun misalnya. Bayangkan jika terdapat kesempatan kerja yang juga cukup untuk menampung mereka, maka akan terjadi kelebihan kemampuan memenuhi kebutuhannya sehingga ada kemampuan bagi rumah tangga untuk melakukan *saving* atau melakukan investasi *human capital* yang lebih tinggi baik bagi kedua orang tua pada ilustrasi tadi ataupun bagi anaknya. Investasi *human capital* misalnya dengan menyekolahkan pada jenjang yang lebih tinggi, ataupun meningkatkan kemampuan tambahan misalnya melalui kursus dan lain-lain.

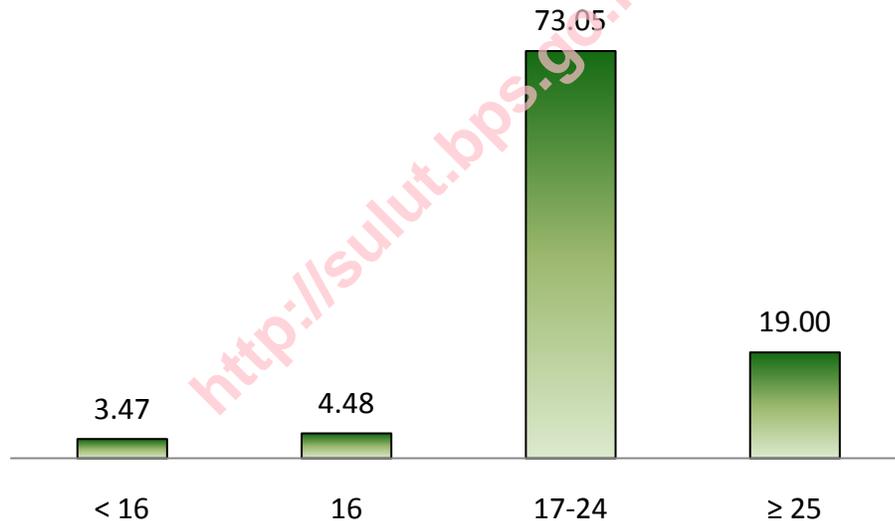
Gambar 2. Periode Windows of Opportunity Nasional yang Terjadi pada Periode 2010-2045



1.4. Fertilitas

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor demografi, yaitu tingkat kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi). Tingkat fertilitas merupakan faktor demografi yang paling menentukan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk. Program KB dan penundaan usia perkawinan pada wanita merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas, karena memperpendek masa reproduksi mereka.

Gambar 3. Persentase Wanita Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Melakukan Perkawinan Pertama Menurut Umur Perkawinan Pertama di Sulawesi Utara, 2009



Usia perkawinan pertama seorang wanita berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan ibu maupun anak, karena belum matangnya rahim wanita muda untuk proses berkembangnya janin atau karena belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2009, ada 3 sampai 4 wanita dari 100 wanita usia 10 tahun ke atas di Sulawesi Utara yang melakukan perkawinan pertamanya di usia kurang dari 16 tahun.

2. KESEHATAN

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari rata-rata lama sakit atau lamanya terganggu aktifitas sehari-hari. Di Sulawesi Utara rata-rata lamanya seseorang terganggu karena sakitnya mengalami penurunan atau perbaikan dari tahun 2008 ke tahun 2009, yaitu dari 5,76 hari menjadi 4,54 hari. Bila dilihat per kabupaten/kota, sebagian besar rata-rata lama sakit mengalami penurunan dalam periode yang sama. Kabupaten/kota yang tercatat mengalami peningkatan hanya Kabupaten Minahasa sekaligus memiliki rata-rata lama sakit terpanjang yaitu 6,58 hari. Dan rata-rata lama sakit yang terpendek adalah di Bolaang Mongondow Utara dan Kota Manado, yaitu sekitar 3 sampai 4 hari.

Tabel 2.1 Rata-rata Lama Sakit per Kabupaten/ Kota di Sulawesi Utara, 2007-2009

Kabupaten/Kota	Rata – rata Lama Sakit		
	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Mongondow	7,36	5,78	4,44
Minahasa	6,72	6,32	6,58
Kep. Sangihe	5,72	5,17	4,05
Kep. Talaud	5,50	4,83	4,07
Minahasa Selatan	6,44	6,12	4,73
Minahasa Utara	6,09	4,99	4,29
Bolaang Mongondow Utara	5,86	6,00	3,93
Kep. Siau Tagulandang Biaro	12,22	5,82	5,17
Minahasa Tenggara	7,05	5,66	4,94
Manado	4,92	5,97	3,64
Bitung	6,71	5,43	5,01
Tomohon	6,16	5,16	3,49
Kotamobagu	4,82	5,65	4,39
Sulawesi Utara	5,25	5,76	4,54

Sumber : Susenas

2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Hal yang penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya).

Dalam hal tenaga persalinan, masyarakat Sulawesi Utara umumnya sudah memiliki preferensi untuk menggunakan tenaga kesehatan/medis. Terlihat dari

besarnya persentase penolong persalinan oleh tenaga medis yang mencapai 76,6 persen pada tahun 2009. Masih ada 23,4 persen persalinan yang dilakukan oleh non tenaga medis. Angka ini berfluktuasi selama periode 3 tahun pengamatan dengan kisaran yang tidak jauh berbeda yakni berkisar 76 sampai 78 persen untuk persalinan yang ditolong tenaga medis.

Persalinan pertama yang ditolong oleh tenaga terdidik dan terlatih akan meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi. Peningkatan persentase penolong persalinan oleh tenaga kesehatan idealnya terus meningkat dari tahun ke tahun, karena hal tersebut terkait erat dengan kelangsungan hidup ibu dan bayi yang dilahirkannya. Persentase persalinan yang ditolong pertama kali oleh bidan merupakan yang terbesar yakni mencapai 45,91 persen. Bidan saat ini mudah dijangkau sejak adanya program bidan desa. Di perkotaan terlebih karena setiap Puskesmas tersedia tenaga bidan. Masih banyaknya persalinan yang dilakukan oleh tenaga dukun bayi (21,74%) menunjukkan di masyarakat pedesaan pilihan bidan merupakan *trade off* dengan pilihan dukun bayi. Manakala bidan sulit didapat maka dukun merupakan pilihan lain. Terutama bagi desa-desa yang jauh dari jangkauan puskesmas. Dengan kondisi demikian mau tidak mau eksistensi dukun bayi tetap strategis. Program pemerintah tidak mutlak hanya dengan menambah tenaga medis tetapi juga tetap diperlukan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan kesehatan bagi dukun bayi mengingat eksistensi mereka tadi.

Gambar 4. Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi di Sulawesi Utara, 2009



Persalinan yang ditangani oleh dokter sudah cukup banyak yakni 29,67 persen. Banyak masyarakat perkotaan lebih memilih dokter dibanding tenaga medis lain apalagi dukun bayi. Kemudahan mendapatkan pelayanan dokter di perkotaan menjadikan masyarakat lebih memilih dokter. Bidan biasanya tersedia di rumah bersalin dan puskesmas. Rumah sakit yang ditangani oleh dokter biasanya menjadi pilihan utama bagi masyarakat perkotaan untuk melakukan proses persalinan.

Tabel 2.2 Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi di Sulawesi Utara, 2007-2009

Penolong Persalinan Pertama	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Kesehatan	75,98	78,38	76,60
Dokter	24,96	29,73	29,67
Bidan	48,29	47,26	45,91
Lainnya	2,73	1,39	1,02
Bukan tenaga kesehatan	24,02	21,62	23,40
Dukun tradisional	22,10	19,74	21,74
Family/keluarga	1,69	1,67	1,34
Lainnya	0,23	0,19	0,32

Sumber : Susenas

Bila dilihat (Tabel 2.3) menurut kabupaten/kota maka daerah-daerah seperti Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Manado, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu penolong kelahiran pertamanya oleh tenaga kesehatan lebih dari 75 persen, sementara itu daerah seperti Kepulauan Talaud, Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara penolong kelahiran pertamanya oleh tenaga kesehatan hanya dibawah 60 persen saja. Daerah-daerah tersebut memerlukan perhatian yang cukup serius terutama dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2.3 Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2009

Kabupaten/Kota	Penolong Kelahiran Pertama		Jumlah
	Tenaga Kesehatan	Bukan Tenaga Kesehatan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Bolaang Mongondow	54,98	45,02	100,00
02. Minahasa	92,81	7,19	100,00
03. Kep. Sangihe	80,13	19,87	100,00
04. Kep. Talaud	55,33	44,67	100,00
05. Minahasa Selatan	64,73	35,27	100,00
06. Minahasa Utara	74,78	25,22	100,00
07. Bolaang Mongondow Utara	39,17	60,83	100,00
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	67,15	32,85	100,00
09. Minahasa Tenggara	75,27	24,73	100,00
71. Manado	91,30	8,70	100,00
72. Bitung	84,76	15,24	100,00
73. Tomohon	98,11	1,89	100,00
74. Kotamobagu	78,57	21,43	100,00
Sulawesi Utara	76,60	23,40	100,00

Sumber: Susenas

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri, maupun berobat jalan. Mengobati sendiri adalah upaya seseorang yang melakukan pengobatan tanpa datang ke tempat fasilitas kesehatan maupun memanggil dokter/petugas kesehatan ke rumahnya. Ada 3 jenis pengobatan sendiri, yaitu dengan obat tradisional, obat modern dan obat lainnya selain obat tradisional dan obat modern. Yang dimaksud dengan obat modern adalah obat yang dibeli dari warung atau apotik tanpa resep dokter. Pada tahun 2009, sebanyak 93,14 persen dari penduduk di Sulawesi Utara yang mengalami gangguan kesehatan mengobati sendiri penyakitnya dengan mengkonsumsi obat modern. Ini

menunjukkan bahwa mengkonsumsi obat modern menjadi pilihan utama masyarakat yang berobat sendiri saat mengalami gangguan kesehatan. Tabel 2.4 menunjukkan bahwa dari tahun 2008 ke tahun 2009 terjadi peningkatan persentase penduduk yang mengobati sendiri dengan obat modern, sementara itu pengobatan tradisional dan lainnya persentasenya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan obat-obatan modern daripada pengobatan tradisional ataupun lainnya.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri menurut Jenis Pengobatan yang Digunakan per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2008-2009

Kabupaten/Kota	Jenis Obat yang Digunakan					
	Tradisional		Modern		Lainnya	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Bolaang Mongondow	7,36	14,37	96,93	92,94	3,19	5,43
02. Minahasa	13,95	9,77	92,41	92,07	5,27	1,76
03. Kep. Sangihe	17,34	25,63	91,21	94,12	3,30	4,62
04. Kep. Talaud	33,48	25,93	83,41	97,33	10,12	1,64
05. Minahasa Selatan	22,81	13,09	84,48	91,72	19,78	8,91
06. Minahasa Utara	19,82	11,01	90,25	93,62	9,09	3,07
07. Bolaang Mongondow Utara	11,44	21,26	94,83	93,75	1,81	1,36
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	24,01	16,03	90,19	90,62	12,59	3,66
09. Minahasa Tenggara	22,47	4,96	94,69	97,27	6,75	8,36
71. Manado	8,85	11,47	93,48	91,02	5,77	10,96
72. Bitung	10,38	14,28	94,60	95,68	5,28	3,94
73. Tomohon	8,27	5,69	95,17	95,85	2,00	1,36
74. Kotamobagu	4,26	9,87	98,36	91,71	2,59	4,44
Sulawesi Utara	13,29	12,82	93,08	93,14	6,32	5,35

Sumber : Susenas

Dalam hal tempat berobat bagi penduduk yang berobat jalan, yang paling menonjol pada tahun 2009 adalah penduduk yang berobat ke praktek dokter dan puskesmas/pustu yang besarnya masing-masing sekitar 35 persen dan 31 persen.

Tabel 2.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat, 2007-2009

Tempat Berobat	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit			
Pemerintah	7,88	6,78	7,33
Swasta	3,04	4,75	2,98
Praktek Dokter	29,23	11,52	35,42
Puskesmas/Pustu	31,66	44,76	30,71
Petugas kesehatan/ Praktek Nakes	25,06	29,29	20,66
Praktek Tradisional/Batra/ Dukun	1,07	0,96	0,75
Lainnya	2,06	1,95	2,16

Sumber : Susenas

3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Mengingat pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan secara formal maupun non formal. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat karena belum semua anak Indonesia dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar, antara lain karena faktor kemiskinan keluarga. Upaya untuk menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan pendidikan antara lain terlihat dari usaha Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), yang menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu keluarga miskin agar anak mereka tetap memperoleh pendidikan.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, bahkan semenjak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun sebagai peningkatan dari program wajib belajar 6 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk

3.1 Tingkat Pendidikan

Kemampuan baca-tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Penduduk yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya di Sulawesi

Utara pada tahun 2009 sudah mencapai 99,27 persen, sisanya sebanyak 0,73 persen adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak dapat membaca atau buta huruf.

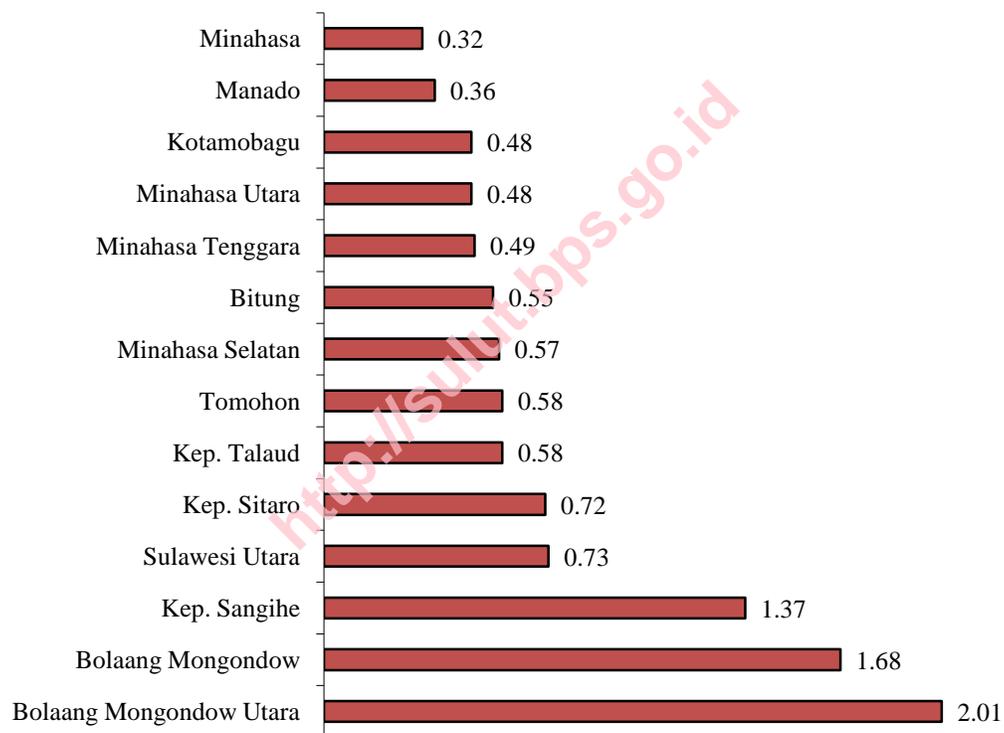
Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2009

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Bolaang Mongondow	98,89	97,69	98,32
02. Minahasa	99,85	99,50	99,68
03. Kep. Sangihe	98,90	98,38	98,63
04. Kep. Talaud	99,38	99,46	99,42
05. Minahasa Selatan	99,28	99,58	99,43
06. Minahasa Utara	99,75	99,29	99,52
07. Bolaang Mongondow Utara	98,15	97,83	97,99
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	99,51	99,07	99,28
09. Minahasa Tenggara	99,32	99,70	99,51
71. Manado	99,79	99,49	99,64
72. Bitung	99,69	99,22	99,45
73. Tomohon	99,37	99,47	99,42
74. Kotamobagu	99,39	99,65	99,52
Sulawesi Utara	99,43	99,11	99,27

Sumber : Susenas 2009

Jika dilihat menurut jenis kelamin, Angka Melek Huruf penduduk laki-laki pada tahun 2008 sebesar 99,43 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan 99,11 persen. Belum dapat dikatakan adanya diskriminasi terlebih jika melihat pola di seluruh kabupaten/kota dimana tidak ada perbedaan signifikan antara Angka Melek Huruf laki-laki dan perempuan. Bahkan di enam kabupaten/kota Angka Melek Huruf perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam hal pendidikan di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Gambar 5. Angka Buta Huruf menurut Kabupaten/Kota, 2009



Jika dilihat per kabupaten/kota, angka buta huruf tertinggi terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 2,01 persen, Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 1,68 persen dan Kabupaten Kep. Sangihe sebesar 1,37 persen (Gambar 5). Angka buta huruf di Provinsi Sulawesi Utara sudah relatif rendah, namun demikian bukan berarti program pemberantasan buta huruf tidak diperlukan. Justru dengan rendahnya angka buta huruf sebenarnya mempermudah identifikasi penduduk yang mengalami buta huruf dan diberikan perhatian khusus untuk

mengikuti program pemberantasan buta huruf khususnya bagi mereka yang masih berusia produktif. Selain itu dikaitkan dengan evaluasi kemajuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan angka buta huruf secara signifikan akan meningkatkan nilai IPM yang sekaligus menunjukkan perkembangan prestasi daerah dalam meningkatkan kualitas manusia.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara diantaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang lebih berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Gambaran mengenai peningkatan SDM dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas yang sudah menamatkan sekolah. Sekitar setengah penduduk usia 10 tahun ke atas di Sulawesi Utara sudah menamatkan pendidikan minimal SLTP (51,68%) dan sisanya adalah penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak punya ijazah (21,41%) dan tamat SD (26,91%).

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 10 tahun keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2009

Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Tamat SD	21,95	20,85	21,41
Sekolah Dasar	26,87	26,95	26,91
SLTP	19,54	20,17	19,86
Sekolah Menengah/SMU	20,16	19,92	20,04
SM Kejuruan	5,50	6,38	5,94
Diploma I/II	0,62	0,85	0,73
Diploma III/Sarmud	1,36	1,17	1,27
Diploma IV/S I	3,73	3,49	3,61
S2/S3	0,25	0,22	0,23
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2009

Seperti halnya pada angka buta huruf, pada statistik pendidikan yang ditamatkan pun tidak terlihat adanya disparitas jender. Bahkan perempuan sedikit lebih banyak yang menamatkan pendidikan minimal SLTP jika dibanding penduduk laki-laki yakni 52,20 persen berbanding 51,18 persen. Kesempatan laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan secara tradisi sudah menunjukkan adanya kesetaraan.

3.2 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah (APS). Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Program Wajib Belajar 9 tahun belum sepenuhnya berhasil. Ditunjukkan dengan APS Sulawesi Utara pada anak usia 7-12 tahun yang sebesar 97,82 persen (Tabel 3.3). Dengan kata lain masih ada 2,18 persen anak usia SD yang seharusnya bersekolah ternyata sudah berhenti atau putus sekolah. Pada anak usia 13-15 tahun, APS jauh lebih kecil lagi hanya sekitar 88,35 persen. Padahal mereka juga merupakan sasaran dari Wajib Belajar 9 tahun. Pada kelompok usia SLTA (16-18 tahun) APS jelas akan lebih kecil lagi, karena banyak diantara mereka sudah terjun ke dunia kerja. Pada kelompok usia ini APS 2009 sebesar 56,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah, 2009

Usia Sekolah (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12	97,49	98,17	97,82
13 – 15	84,32	92,76	88,35
16 – 18	53,01	60,32	56,53

Sumber : Susenas 2009

Isu jender pada indikator APS Sulawesi Utara cukup menarik. Umumnya di Indonesia ataupun di negara-negara berkembang biasanya anak-anak perempuan ada diskriminasi untuk menikmati pendidikan. Mereka lebih dieksploitasi untuk membantu orang tuanya dalam mengurus urusan rumah tangga ataupun bekerja. Anak laki-laki justru mendapat perhatian lebih dalam hal pendidikan karena dialah yang diharapkan akan mengembalikan investasi sekolah atau dengan kata lain ada anggapan *rate of return* investasi pendidikan pada anak laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Di Sulawesi Utara yang terjadi sebaliknya, anak perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi pada semua jenjang pendidikan dibanding anak laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah anak laki-laki justru yang "dikorbankan" oleh orang tuanya untuk tidak bersekolah dan sebagian dari mereka membantu orang tuanya bekerja. Pada level SD, disparitas APS masih kecil yakni hanya 98,17 persen untuk perempuan dibanding 97,49 persen APS laki-laki. Pada jenjang SLTP disparitasnya lebih dari 8 persen, hampir sama dengan disparitas pada jenjang SLTA.

3.3 Fasilitas Pendidikan

Semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah, khususnya untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP harus diikuti dengan meningkatnya fasilitas pendidikan, terutama mengenai daya tampung ruang kelas, sehingga program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat berhasil. Guna mengatasi kekurangan daya tampung, pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan seperti menambah pembangunan unit gedung baru dengan prioritas gedung yang rusak berat serta mengangkat guru kontrak maupun guru bantu untuk ditempatkan pada sekolah yang kekurangan guru.

Tabel 3.4 Rasio Murid –Guru dan Murid-Kelas tahun 2006/2007

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap Kelas
(1)	(2)	(3)
SD / MI	18,23	19,05
SLTP / MTs	16,30	28,40
SLTA / MA / SMK	18,44	32,27

Sumber : Sulut Dalam Angka 2009

Guru dan Sekolah merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pendidikan. Tabel 3.4 menggambarkan rasio murid terhadap guru dan guru terhadap sekolah, yang merupakan suatu indikasi mulai efektifnya proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Dilihat dari jenjang pendidikan di Sulawesi Utara untuk tahun ajaran 2006-2007, rasio murid terhadap guru untuk tingkat SLTP adalah yang terkecil dibandingkan dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan SLTA. Di tingkat SD/MI, 1 orang guru mengawasi hampir sekitar 18 sampai 19 murid. Sedangkan untuk jenjang SLTP/MTs, 1 orang guru mengawasi 16 sampai 17 orang murid dan untuk jenjang pendidikan SLTA/MA/SMK, 1 orang guru mengawasi 18 sampai 19 orang murid. Secara umum, pada semua jenjang pendidikan Rasio Murid-Guru masih dalam rentang angka yang ideal yakni 20 ke bawah.

Berbeda dengan Rasio Murid-Guru, pada indikator Rasio Murid-Kelas tidak sepenuhnya menggambarkan angka yang ideal. Hanya pada jenjang SD yang memiliki rasio yang ideal yakni 19,05 murid per kelas. Pada jenjang SLTP sudah mencapai 28,40 murid per kelas. Secara rata-rata angka ini masih memungkinkan efektifitas proses belajar mengajar tetapi jika dilihat per sekolah tentu ada SLTP yang memiliki rasio di atas angka ini sehingga diperlukan tambahan rombongan belajar menggunakan sistem shift atau bergantian ruangan kelas. Terlebih untuk jenjang SLTA, dengan rasio sebesar 32,27 murid per kelas mutlak diperlukan penambahan rombongan belajar jika tidak ada penambahan jumlah ruang kelas. Pemenuhan rasio yang efektif selain mempermudah guru dalam mengajar, akan menjadikan siswa lebih fokus dalam menyerap apa yang disampaikan oleh guru.

4. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi diantara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai. Dari data pengeluaran dapat juga diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

4.1 Perkembangan Kemiskinan

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangannya, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas yang paling utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Program yang dijalankan pemerintah pada Tahun Anggaran 2005 antara lain bantuan/subsidi di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan infrastruktur pedesaan, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2005.

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan. Indikator yang paling sering dipergunakan adalah *head-count index* (P_0). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada suatu wilayah. Namun demikian, indikator ini tidak dapat mengindikasikan seberapa parah atau seberapa dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak akan berubah jika seseorang yang miskin menjadi bertambah miskin.

Oleh karena itu, dikenal juga indikator kemiskinan yang lain, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P_2). Penurunan pada P_1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan berkurangnya penurunan pada P_2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan

Secara keseluruhan di provinsi Sulawesi Utara jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 1,79 persen yaitu dari 223,5 ribu jiwa pada tahun 2008 menjadi 219,5 ribu jiwa pada tahun 2009. Jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan pada tahun 2009 menurun menjadi 140,3 ribu jiwa dari 150,1 ribu jiwa tahun sebelumnya. Berbeda dengan daerah pedesaan, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan justru mengalami kenaikan dari 72,7 ribu jiwa pada tahun 2008 menjadi 79,2 ribu jiwa pada tahun 2009. Namun jika dilihat secara umum di Provinsi Sulawesi Utara, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin ini sebagai akibat dari penurunan persentase penduduk miskin (P_0) yaitu dari 10,10 persen pada tahun 2008 menjadi 9,79 persen pada tahun 2009. Jika dilihat menurut daerah, pola

distribusi persebaran penduduk miskin persentasenya lebih besar di daerah pedesaan daripada daerah perkotaan. Pada tahun 2009 penduduk miskin di daerah pedesaan sekitar 11,05 persen, sedangkan di daerah perkotaan hanya sekitar 8,14 persen.

Tabel 4.1 Perkembangan Kemiskinan, 2007 - 2009

Indikator Kemiskinan	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Persentase Penduduk Miskin (P_0)			
- Perkotaan	8,31 (79,0)	7,56 (72,7)	8,14 (79,2)
- Perdesaan	13,80 (171,0)	12,04 (150,9)	11,05 (140,3)
- Perkotaan + Perdesaan	11,42 (250,1)	10,10 (223,5)	9,79 (219,5)
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
- Perkotaan	1,30	1,08	1,22
- Perdesaan	2,33	1,87	1,77
- Perkotaan + Perdesaan	1,88	1,53	1,55
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
- Perkotaan	0,31	0,30	0,32
- Perdesaan	0,60	0,45	0,39
- Perkotaan + Perdesaan	0,47	0,38	0,36

Catatan: Angka dalam tanda kurung menyatakan jumlah penduduk miskin (ribu)

Sumber : Susenas 2007, 2008, 2009

Persoalan kemiskinan tidak hanya mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga perlu memperhatikan jarak terhadap batas miskin (tingkat kedalaman kemiskinan) dan ketimpangan antar penduduk miskin (tingkat keparahan kemiskinan) oleh karena itu selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Selama periode 2008-2009 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan

(P₂) cenderung tidak banyak mengalami perubahan. Indeks Kedalaman Kemiskinan hanya sedikit mengalami pergeseran dari 1,53 menjadi 1,55. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan sedikit mengalami penurunan dari 0,38 menjadi 0,36. Pergerakan Indeks kedalaman kemiskinan sedikit bergeser naik mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan sedikit melebar. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan yang mengalami penurunan mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin sempit. Nilai-nilai P₁ dan P₂ di daerah pedesaan lebih besar daripada perkotaan (Tabel 4.1) sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di pedesaan lebih buruk daripada perkotaan.

4.2 Taraf Konsumsi dan Protein

Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Kecukupan energi dan protein untuk tingkat konsumsi sehari-hari berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi ke-8 Tahun 2004 masing-masing sebesar 2000 kkal dan 52 gram protein.

Pada tahun 2009 penduduk Sulawesi Utara rata-rata mengkonsumsi 1.910,19 kkal atau berkurang sebesar 152,37 kkal dibandingkan tahun sebelumnya. Angka konsumsi kalori per hari penduduk Sulawesi Utara tersebut sedikit dibawah standar kecukupan gizi. Penurunan ini menunjukkan telah terjadi perubahan pola konsumsi makanan penduduk.

Dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk di daerah pedesaan mengkonsumsi energi lebih banyak dibandingkan penduduk di daerah perkotaan. Sementara rata-rata nilai konsumsi protein per kapita penduduk Sulawesi Utara per harinya mengalami sedikit penurunan dari 56,90 gram pada tahun 2008 menjadi 52,10 gram pada tahun 2009, namun masih tetap berada di atas batas kecukupan gizi.

Tabel 4.2 Konsumsi Energi dan Protein per kapita per hari, 2007 - 2009

Tahun	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Energi (kkal)			
2007	2048,35	2138,02	2099,11
2008	1998,52	2111,67	2062,56
2009	1840,94	1963,29	1910,19
Protein (gram)			
2007	58,48	55,83	56,98
2008	58,65	55,56	56,90
2009	51,55	52,52	52,10

Sumber : Susenas Panel Maret 2007- 2009

4.3 Perkembangan Tingkat Kesejahteraan

Determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Penurunan kemampuan daya beli akan mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Pengeluaran per kapita per bulan selama periode 2007-2008 penurunan sebesar 2,65 persen. Namun kemudian, pengeluaran per kapita per bulan selama periode 2008-2009 mengalami peningkatan besar yaitu 12,75 persen.

Tabel 4.3 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan(Rp), 2007 - 2009

Tahun	Pengeluaran per Kapita per Bulan (Rp)	Kenaikan Nominal Setahun (%)
(1)	(2)	(3)
2007	350.807	
2008	341.496	-2,65
2009	385.041	12,75

Sumber : Susenas Panel Maret 2007, 2008 & 2009

4.4 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai perubahan tingkat kesejahteraan.

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2009 menurun dibandingkan tahun 2008. Persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2008 terhitung 53,66 persen, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 52,81 persen. Sebaliknya persentase pengeluaran untuk bukan makanan pada tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan tahun 2008. Hal ini dapat memberi gambaran bahwa telah terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk selama periode 2008-2009.

**Tabel 4.4 Pengeluaran Rata-rata (Rp) Nominal dan
Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan selama Sebulan,
2008-2009**

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Sebulan			
	Nominal		Persentase	
	2008	2009	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	183.243	203.338	53,66	52,81
Non Makanan :	158.253	181.703	46,34	47,19
Perumahan	73.575	85.220	21,54	22,13
Barang dan Jasa	49.846	57.225	14,60	14,86
Pakaian	12.001	12.685	3,51	3,29
Barang Tahan Lama	16.138	17.136	4,72	4,45
Lainnya	6.693	9.438	1,96	2,45
Jumlah	341.496	385.041	100,00	100,00

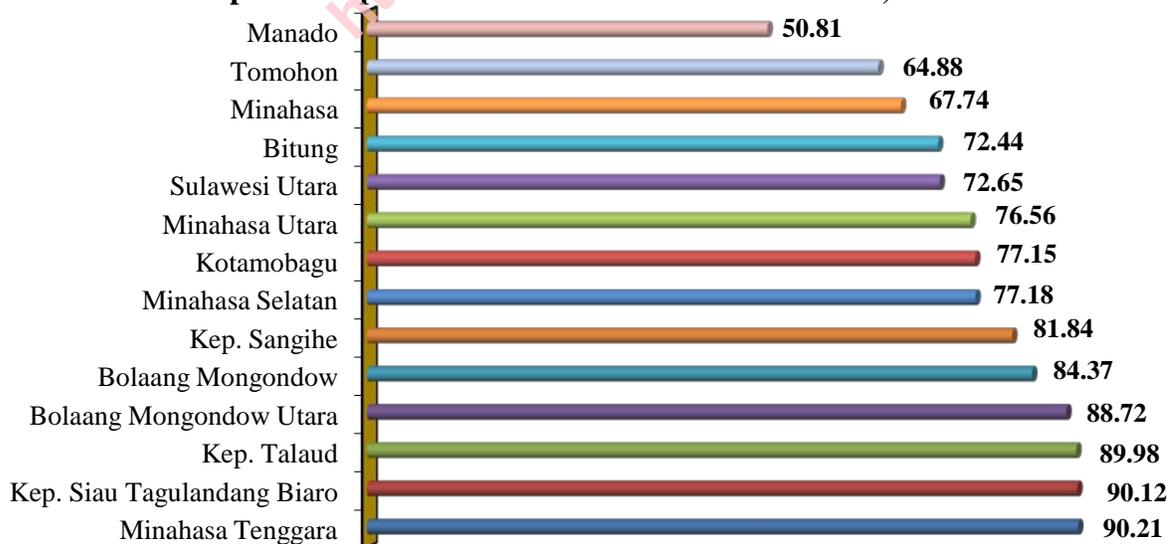
Sumber : Susenas panel 2008-2009

5. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Manusia dan alam lingkungannya baik lingkungan fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

Sepanjang kehidupannya, manusia selalu membutuhkan rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok hidupnya selain sandang dan pangan. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Apabila rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok tersebut tidak dapat tersedia, maka manusia akan sulit untuk hidup secara layak.

Gambar 6. Persentase Rumahtangga yang Menempati Rumah Sendiri per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, 2009



Sebanyak 72,65 persen rumahtangga di Provinsi Sulawesi Utara menempati rumahnya sendiri. Sisanya menempati rumah kontrak, kos, rumah dinas, rumah bebas sewa, rumah milik orangtua, dan lainnya. Dari gambar 5 terlihat bahwa rumahtangga di Kota Manado yang menempati rumahnya sendiri memiliki persentase terendah dibandingkan kab/kota lainnya, yaitu sebesar 50,81 persen. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena lebih banyaknya pendatang di Kota Manado dibandingkan kab/kota lainnya.

Manusia membutuhkan rumah disamping sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung dari hujan maupun panas, rumah juga diperlukan untuk memberi rasa aman penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Rumah menjadi tempat berkumpul bagi para penghuni rumah yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumahtangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumahtangga dan juga tempat penampungan kotoran terakhir.

5.1 Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka, sehingga kondisi kesehatan perumahan juga sangat terkait erat dengan kondisi kesehatan setiap anggota keluarga maupun tetangga sekitar. Bila kondisi perumahan sehat, tentunya peluang setiap anggota rumahtangga untuk memiliki kondisi tubuh yang sehat juga sangat besar. Namun sebaliknya, jika kondisi rumah tidak sehat maka potensi terjadi penularan penyakit juga sangat besar.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga

atau tempat tinggal (perumahan). Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Pada tahun 2009 rumahtangga di Sulawesi Utara yang memiliki luas lantai tempat tinggalnya kurang dari 10 m² per anggota rumahtangga sedikit mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 35,94 persen.

Tabel 5.1 Persentase Rumahtangga menurut Indikator Kualitas dan Fasilitas Perumahan di Sulawesi Utara, 2007 – 2009

Indikator	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Kualitas			
Lantai Tanah	8,19	9,52	8,59
Atap Layak *	92,23	93,76	94,20
Dinding Permanen	92,07	93,32	94,07
Fasilitas			
Luas Lantai per kapita < 10 m ²	32,64	33,39	35,94
Air Minum Leding & Kemasan	26,60	36,69	37,81
Air minum bersih **	56,36	63,52	75,24
Jamban Sendiri	61,99	62,49	65,14

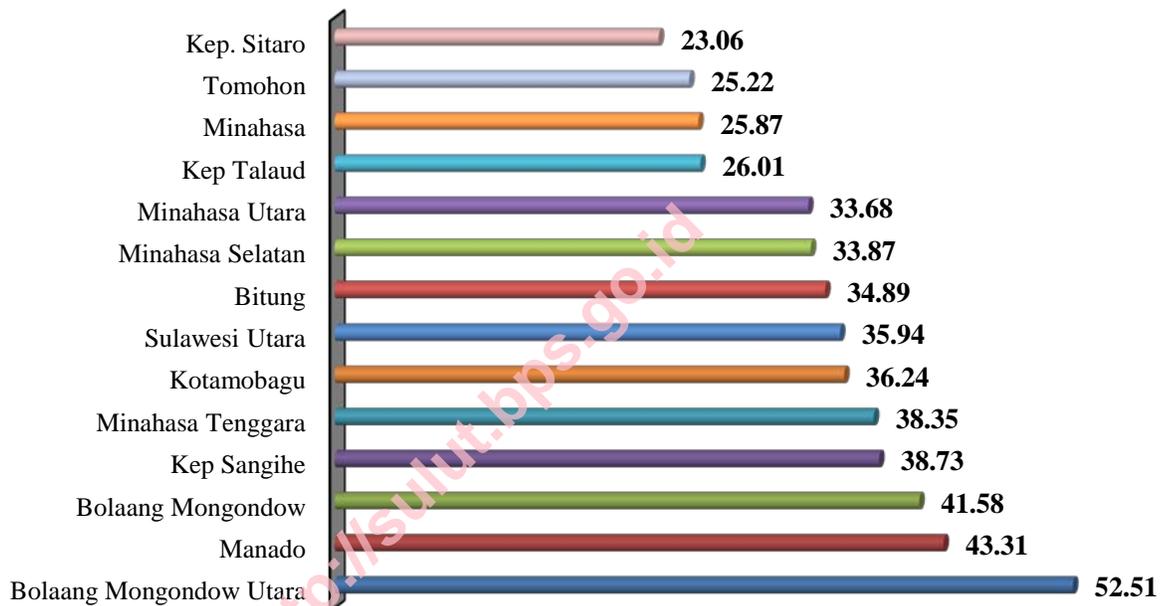
Catatan : * Tidak beratap dedaunan

** Air yang bersumber dari leding, air kemasan, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah ≥ 10 m

Jika dilihat per kabupaten/kota pada Gambar 7, masih ada sebanyak 52,51 persen rumahtangga di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tinggal di rumah yang mempunyai luas kurang dari 10 m². Hal ini lazim ditemui di Provinsi Sulawesi Utara karena hubungan kekerabatan yang masih erat, sehingga beberapa anggota rumahtangga yang sudah berkeluarga menempati rumah yang sama dengan keluarga-

keluarga lain yang masih memiliki ikatan persaudaraan. Sementara itu, persentase terkecil rumah tangga yang mempunyai luas lantai rumah kurang dari 10 m² adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (23,06%).

Gambar 7 . Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai Rumah < 10 m² Per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2009

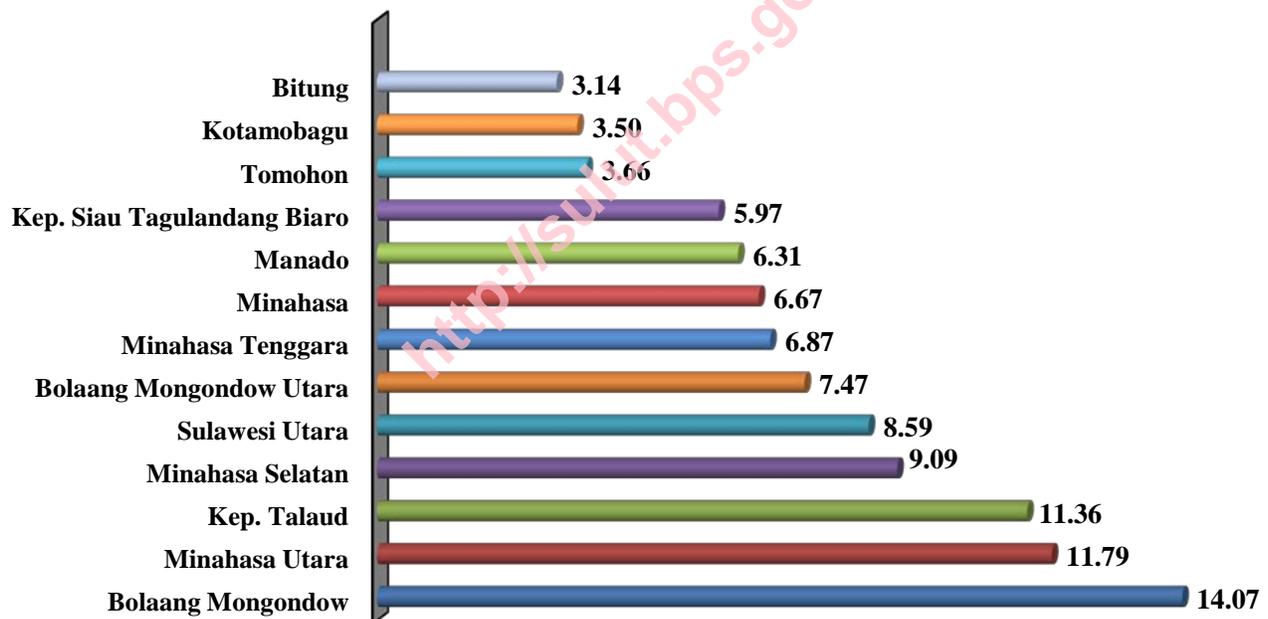


Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumahtangga dengan jenis lantai keramik atau marmer mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada rumahtangga yang mempunyai jenis lantai semen, ubin atau tanah. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit. Berdasarkan data Susenas 2009, masih ada 8,59 persen rumahtangga di Sulawesi Utara yang berlantaikan tanah, menurun dibanding tahun 2008 yaitu 9,52

persen. Semakin rendah persentase rumahtangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada tingginya derajat kesehatan masyarakat.

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumahtangga dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) dan dinding permanen. Sebagian besar masyarakat di Sulawesi Utara tinggal di rumah yang beratap seng. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa terdapat 94,20 persen rumahtangga yang tinggal di rumah yang beratap layak. Persentase ini mengalami kenaikan 0,44 persen dari tahun sebelumnya. Demikian juga dinding, sebanyak 94,07 persen rumahtangga di Sulawesi Utara rumahnya berdinding permanen.

Gambar 8. Persentase Rumahtangga Berlantai Tanah Per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2009



Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumahtangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2009, rumahtangga di Sulawesi Utara yang menggunakan air leding dan air kemasan mencapai 37,81 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2008 ada peningkatan sebesar 1,12 persen.

Sumber air bersih yang lain adalah dari pompa dan sumur/mata air terlindung. Jarak yang ideal antara pompa dan sumur/mata air terlindung ke tempat pembuangan limbah adalah lebih dari 10 m. Yang dimaksud dengan jarak disini adalah jarak sumber air minum dengan tempat pembuangan limbah terdekat. Tempat pembuangan limbah terdekat dalam hal ini bisa milik rumahtangga itu sendiri, bisa juga milik tetangga sekitar. Pada tahun 2009 tercatat sebesar 75,24 persen rumahtangga pengguna air bersih di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 11,72 persen jika dibandingkan dengan tahun 2008, dimana terdapat 63,52 persen rumahtangga dari seluruh rumahtangga di Sulawesi Utara yang sumber air minumnya adalah air kemasan, air leding, pompa dan sumur/mata air yang berjarak ≥ 10 meter dari tempat pembuangan limbah.

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Di Sulawesi Utara, pada tahun 2009 terdapat 65,14 persen rumahtangga yang memiliki jamban sendiri, dan mengalami peningkatan dari tahun 2008 yang sebesar 62,49 persen.

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Utara**

Jl. 17 Agustus Manado 95119
Telp : (0431)847044, Fax : (0431)862204
Homepage : <http://sulut.bps.go.id>
E-mail : bps7100@bps.go.id